

BAB 1

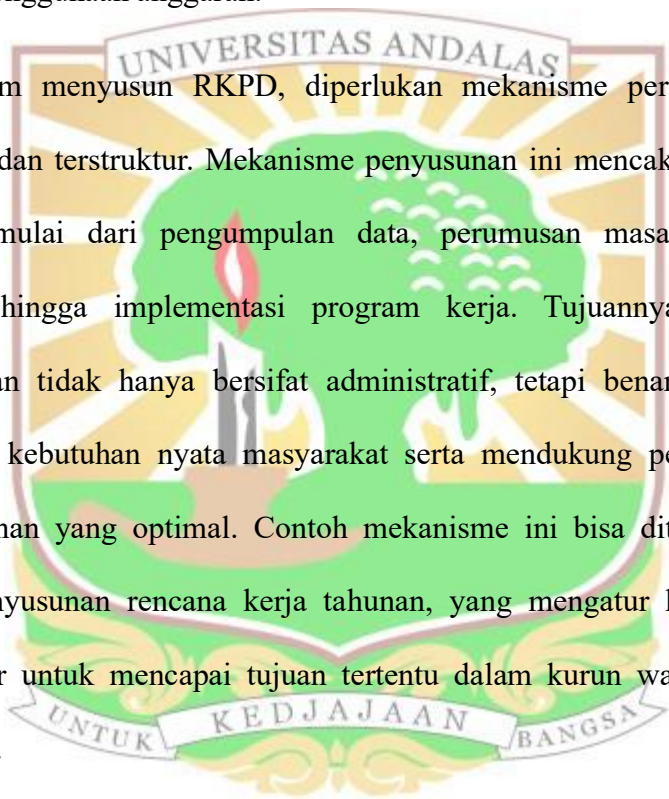
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pemahaman terhadap kondisi umum daerah menjadi bagian yang sangat penting, karena merupakan landasan awal dalam merumuskan arah kebijakan Pembangunan tahunan, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki karakteristik geografis, Sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam, membutuhkan pemetaan kondisi secara komprehensif agar setiap kebijakan Pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Kondisi umum daerah memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi aktual yang sedang dihadapi oleh suatu wilayah. Di Sumatera Barat, misalnya, masih ditemukan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, ketimpangan antarwilayah, hingga tingginya risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, dan letusan gunung api. Semua informasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang harus segera ditangani, sekaligus menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD.

Selain itu, RKPD juga memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan arah kebijakan nasional. Program-program pembangunan yang dirancang di Sumatera Barat tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah dapat terwujud, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat efisiensi penggunaan anggaran.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Dalam menyusun RKPD, diperlukan mekanisme perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Mekanisme penyusunan ini mencakup serangkaian langkah, mulai dari pengumpulan data, perumusan masalah, penetapan prioritas, hingga implementasi program kerja. Tujuannya adalah agar perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung pencapaian hasil pembangunan yang optimal. Contoh mekanisme ini bisa ditemukan dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan, yang mengatur kegiatan secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun akan menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Tahapan RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral dalam penyusunan RKPD, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengumpulan data, konsultasi publik, hingga finalisasi dokumen. Mekanisme penyusunan RKPD diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait

Namun dalam penyusunan RKPD menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian antara usulan masyarakat

dengan prioritas pembangunan, serta dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan perencanaan.

Maka disini Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut serta berperan penting dalam menyusun RKPD dan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, kemudian juga bertanggung jawab dalam menganalisis dan meng-evaluasi terkait apa saja hal-hal yang perlu di pertimbangkan dalam menyusun sebuah perencanaan dengan harapan tepat sasaran serta dapat menekan dampak negatif sekecil mungkin di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas, tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 di badan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan Solusi untuk masalah tersebut

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul Tugas Akhir tentang **“MEKANISME PENYUSUNAN DAN EVALUASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN RALISASI RKPD TAHUN 2025 DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Padang. Yang mana penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah mekanisme penyusunan RKPD telah sesuai dengan regulasi yang berlaku ?
3. Bagaimana Tingkat Kesuaian antara Target Anggaran dan Realisasi Anggaran RKPD di tiap program ?

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan praktik magang ini merupakan simulasi memasuki dunia kerja dengan tujuan mendapat pengalaman disuatu bidang pada sebuah perusahaan atau instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
2. Magang ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dapat diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara efektif yaitu menganalisis Sinkronisasi RKPD dengan RKP, mengukur fleksibilitas

RKPD dalam menyesuaikan kebijakan Nasional dan Kebutuhan Lokal dan menilai konsistensi RKPD dalam Implementasi dan penggarannya.

3. Magang ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi apakah mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan magang dan berbagai kegiatan yang dilakukan ditempat magang, maka penulis juga memperoleh manfaat yang tidak ditemukan secara langsung di bangku perkuliahan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh selama magang, antara lain:

1. Bagi Akademis

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Bagi Praktisi Hasil

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar lebih optimal kedepannya.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam kegiatan magang ini, penulis memilih Lokasi magang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl.Khatib Sulaiman No.3,Lolong Belanti,Padang Utara, Kota Padang

,Sumatra Barat 25173 Telp (0751) 7055183. Untuk waktu magang selama 40 hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penulisan melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Keperpustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas guna melengkapi (*Field Research*).

3. Pengumpulan Data

Melalui Internet Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas guna melengkapi (*Field Research*)

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab, masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain. Sistematika laporan magang ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari Pengertian Perencanaan, Manfaat Perencanaan, Pengertian Rencana Kerja, Pengertian RKPD, Teori Tahapan RKPD dan Landasan Hukum.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, visi dan misi, struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang Bappeda.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang bagaimana Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan saat proses penyusunan RKPD.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan

